

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma

An Analysis Of Budget Realization Report Of The Regional Revenue Agency At Seluma Regency

Risna Purnama Sari ¹⁾; Neri Susanti ²⁾; Kresnawati ³⁾

^{1,2,3)} Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ risnapurnamasari27@icloud.com ;²⁾ nearrysanti@gmail.com ;³⁾ ragilkresnawati@unived.ac.id

How to Cite :

Sari, P, R., Susanti, N., Kresnawati, K. (2025). An Analysis Of Budget Realization Report Of The Regional Revenue Agency At Seluma Regency. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/jemba.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [20 Desember 2024]

Revised [13 Desember 2024]

Accepted [16 Desember 2024]

KEYWORDS

Budget Realization Report (LRA),
Effectiveness, Efficiency.

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Metode yang digunakan yaitu deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2021 cukup efektif dengan persentase 91,48% sedangkan tahun anggaran 2022 tidak efektif dengan persentase 74,1% dan rata – rata rasio efektivitas nya kurang efektif dengan rasio 82,79%. Rasio efisiensi anggaran belanja pada tahun anggaran 2021 menunjukkan kriteria efisien dengan persentase 71,04% dan tahun anggaran 2022 menunjukkan kriteria cukup efisien dengan persentase 82,1% dan rata – rata rasio efisiensi nya sudah efisien dengan persentase 76,57%. Dengan tingkat dan kriteria yang ditentukan serta target yang ingin dicapai Bapenda Kabupaten Seluma belum dapat dikategorikan kinerja keuangan yang sangat efektif dan sangat efisien dikarenakan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi anggaran belanja mengalami penurunan pada tahun anggaran 2022.

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine and analyze the effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) and the efficiency of the Budget Realization Report (LRA) expenditure budget at the Seluma Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA) for the 2021 fiscal year and 2022 fiscal year. The method used is Quantitative descriptive using effectiveness and efficiency ratios. The results of the research conducted show that the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD) for the 2021 fiscal year is quite effective with a percentage of 91.48% while the 2022 fiscal year is ineffective with a percentage of 74.1% and the average effectiveness ratio is less effective with a ratio of 82.79%. The efficiency ratio of the expenditure budget in fiscal year 2021 shows efficient criteria with a percentage of 71.04% and fiscal year 2022 shows quite efficient criteria with a percentage of 82.1% and the average efficiency ratio is efficient with a percentage of 76.57%. With the level and criteria determined and the target to be achieved, Bapenda Seluma Regency cannot be categorized as highly effective and highly efficient financial performance because the PAD effectiveness ratio and the expenditure budget efficiency ratio have decreased in fiscal year 2022.

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap.,2013:3 dalam Maith.,2013:3). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan adalah dokumen yang menampilkan kondisi keuangan dan performa perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Informasi yang disajikan mencakup aset, utang, modal, pendapatan, biaya, laba, arus kas, dan data relevan lainnya yang penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan (Tibyana et al., 2024:4).

Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang mana digunakan untuk mengetahui apakah dalam menggunakan anggaran tersebut dapat dikatakan efektif dan efisien ataupun sebaliknya, dalam mengukur atau membandingkan antara keluaran (output) yang telah dihasilkan terhadap masukan (input) yang digunakan, efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk dipergunakan (Sari et al., 2023:10). Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/instansi.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum, Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. LRA juga menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Serapan anggaran yang rendah dan belum optimal karena kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberikan perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ukuran kemampuan keuangan daerah. APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintah, pembangunan dan pelaksanaan sosial. PAD yang besar menunjukkan tingginya kemandirian suatu daerah dalam membiayai urusan pemerintahan. Sebaliknya, daerah belum bisa dikatakan mandiri jika PAD dalam membiayai pemerintahannya masih kecil. Efisiensi merupakan sebuah ukuran dari suatu keberhasilan atau tercapainya yang bisa dilakukan penilaian berdasarkan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan kegiatan pemerintah sedangkan efektivitas merupakan sebuah ukuran tingkatan suatu kegiatan dalam mencapai sebuah tujuannya sudah mencapai sejauh mana (Yuliyanto et al., 2022:457). Kabupaten Seluma merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berdiri pada tahun 2003. Memiliki 29 OPD yang terdiri dari 6 Badan, 1 Kantor dan 22 Dinas, salah satu badannya yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Tugas Bapenda secara umum adalah melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran sebagai tolak ukur kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja setiap tahunnya (Ropa et al., 2016:741).

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Halim (2001) yang menyatakan: “pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi”. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Bratakusumah dan Solihin (2004) yang menyebutkan: “pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka APBD yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas

mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Anggaran

Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. (Mahsun, 2006:204 dalam Basri, 2013:204) menyatakan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan bisa diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Fasha, (2023:19) menyatakan laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau pada jangka waktu tertentu. Fasha juga menyatakan tentang laporan keuangan daerah adalah: "Laporan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan".

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Menurut PP 71 Tahun 2010, LRA menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapat LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari sesuatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

1. Informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi.
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi penggunaan anggaran.

Efisiensi

Mardiasmo, (2009:10) dalam Sari et al., (2023:10) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) deskriptif kuantitatif adalah konsisten dengan variabel penelitian, fokus pada permasalahan aktual dan fenomena yang sedang terjadi, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka – angka yang bermakna. Untuk melakukan analisis deskriptif kuantitatif digunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

Untuk melihat tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target penerimaan PAD sumber Fasha, (2023). Perhitungan rasio efektivitas sebagai berikut :

$$\text{RasioEfektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Cara mengukur kinerja efektivitas keuangan sebagai berikut:

Tabel 1 Metode Rasio Efektivitas

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	≥ 100 %	Sangat efektif
2	100 %	Efektif
3	90 – 99 %	Cukup efektif
4	75 – 89 %	Kurang efektif
5	≤ 75 %	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi, (2019) dalam Agnika et al., (2021:4)

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja Sumber : (Fasha, 2023). Perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Cara mengukur kinerja efisiensi keuangan seperti pada tabel 5 sebagai berikut: Cara mengukur kinerja efisiensi keuangan sebagai berikut:

Tabel 2 Metode Rasio Efisiensi

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	≥ 100 %	Tidak efisien
2	90 – 100 %	Kurang efisien
3	80 – 90 %	Cukup efisien
4	60 – 80 %	Efisien
5	≤ 60 %	Sangat efisien

Sumber : Sari et al., (2023:13)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	- Pendapatan Pajak Daerah	16.485.603.578	13.112.334.769
	- Pendapatan retribusi daerah	990.000.000	244.347.500
	- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	- Lain – lain PAD yang sah	22.076.582.830	22.829.527.665
	JUMLAH PAD	39.552.186.408	36.186.209.934
2	PENDAPATAN TRANSFER		
	- Pendapatan transfer pemerintah pusat	819.768.901.000	820.937.819.304
	- Pendapatan transfer antar daerah	58.896.349.435	40.231.947.454
3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
	- Lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan	30.280.400.000	27.686.975.751
	JUMLAH PENDAPATAN	948.497.836.843	925.042.952.443
4	BELANJA		
	Belanja operasi		
	- Belanja pegawai	738.913.899	600.143.088
	- Belanja barang dan jasa	497.494.000	278.287.
	-Belanja Hibah		
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.236.407.899	878.430.701
	Belanja modal		

Sumber: Bapenda Kabupaten Seluma. Data diolah 2024

Berikut data LRA Bapenda Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022:

Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	- Pendapatan Pajak Daerah	19.065.000.000	12.487.869.074
	- Pendapatan retribusi daerah	4.850.000.000	713.058.310
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain – lain PAD yang sah	30.160.835.000	26.872.998.840
	JUMLAH PAD	54.075.835.000	40.073.926.224
2	PENDAPATAN TRANSFER		
	- Pendapatan transfer pemerintah pusat	822.878.217.000	779.208.235.687
	- Pendapatan tranfer antar daerah	58.966.456.716	48.243.359.350
	JUMLAH PENDAPATAN	935.920.508.716	867.525.521.261
3	BELANJA		
	Belanja operasi		
	- Belanja pegawai	3.308.974.249	2.671.914.888
	- Belanja barang dan jasa	1.141.416.860	951.993.553
	-Belanja hibah		
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.450.391.109	3.623.908.441
	Belanja modal		
	- Belanja peralatan dan mesin	175.600.000	174.381.000
	- Belanja modal aset tetap lainnya	150.000.000	0
	JUMLAH BELANJA	4.625.991.109	3.798.289.441

Sumber: Bapenda Kabupaten Seluma. Data diolah 2024

Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021

$$\text{RasioEfektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{36.186.209.934}{39.552.186.408} \times 100\%$$

$$= 91,48\%$$

Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022

Rasio efektivitas tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RasioEfektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{40.073.926.224}{54.075.835.000} \times 100\%$$

$$= 74,1\%$$

Hasil dari penghitungan rasio efektivitas tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma

Tahun	Target	Realiasi	Persentase rasio efektivitas	Keterangan Efektivitas
2021	39.552.186.408	36.186.209.934	91,48%	Cukup Efektif
2022	54.075.835.000	40.073.926.224	74,1%	Tidak Efektif
Rata - rata			82,79%	Kurang Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Seluma. Data diolah 2024

Pada tabel diatas menjelaskan rasio efektivitas penerimaan PAD Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021 tahun anggaran 2022, nilai presentase LRA penerimaan PAD dalam merealisasikan anggaran tahun 2021 sebesar 91,48% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Seluma cukup efektif, karena kriteria efektifitas penerimaan PAD 90 – 99% sehingga dapat dikatakan cukup efektif dan realisasikan anggaran tahun 2022 sebesar 74,1% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Seluma tidak efektif, karena kriteria efektifitas penerimaan PAD ≤75% sehingga dapat dikatak tidak efektif.

Rasio Efisiensi Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{878.430.701}{1.236.407.899} \times 100\%$$

$$= 71,04\%$$

Rasio Efisiensi Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022

Rasio efisiensi tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.798.289.441}{4.625.991.109} \times 100\%$$

$$= 82,1\%$$

Hasil dari penghitungan rasio efektivitas tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma

Tahun	Target	Realiasi	Persentase rasio efisiensi	Keterangan Efisiensi
2021	1.236.407.899	878.430.701	71,04%	Efisien
2022	4.625.991.109	3.798.289.441	82,1%	Cukup Efisien
Rata – rata			76,57%	Efisien

Sumber: Bapenda Kabupaten Seluma. Data diolah 2024

Pada tabel diatas menjelaskan rasio efisiensi anggaran belanja Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021 tahun anggaran 2022 nilai presentase LRA belanja dalam merealisasikan anggaran belanja tahun 2021 sebesar 71,04% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Seluma efisien, karena kriteria efisien belanja 60 – 80% sehingga dapat dikatakan efisien dan realisasikan anggaran belanja tahun 2022 sebesar 82,1% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Bapenda Kabupaten

Seluma cukup efisien, karena kriteria efisiensi anggaran belanja 80 – 90% sehingga dapat dikatakan cukup efisien.

Pembahasan

Pada pembahasan ini membahas tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran, adapun rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Berikut tabel rata – rata rasio efektivitas penerimaan PAD dan efisiensi Anggaran Belanja pada Bapenda Kabupaten Seluma:

Tabel 7 Rata – Rata Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Bapenda Kabupaten Seluma

No	Rasio	Rata - rata	Keterangan
1	Rasio efektivitas	82,79%	Kurang efektif
2	Rasio Efisiensi	76,57%	Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas penerimaan PAD Bapenda Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa dari tahun anggaran 2021 ke tahun anggaran 2022 mengalami penurunan yang sebelumnya realisasi anggaran PAD cukup efektif menjadi tidak efektif. Realisasi anggaran PAD tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dikarenakan pendapatan pajak daerah lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2021 hal tersebut diduga beberapa CV dan PT di Kabupaten Seluma menunggak melakukan pembayaran pajak dengan alasan CV dan PT tersebut tidak maksimal beroperasi karena sedikit nya pesanan material dan tidak terlalu banyak proyek yang ada di Kabupaten Seluma dan ada beberapa restoran di Kabupaten Seluma menunggak pembayaran pajak dengan alasan restoran mengalami penurunan omset dikarenakan restoran agak sepi sehingga penjualan menurun.

Berdasarkan hasil data tidak tertulis (wawancara) dengan Kepala Bapenda Kabupaten Seluma Bapak Suparjo, S.Sos M.Si Bapenda Kabupaten Seluma terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD dengan memasang tapping box di sektor pajak restoran, melakukan koordinasi dengan kantor desa dan kelurahan untuk meningkatkan capaian bidang penagihan dan tim monitoring dan evaluasi Bapenda Kabupaten Seluma mengunjungi wajib pajak secara langsung di sektor pajak PBB-P2 dan sarang burung walet untuk mengoptimalkan capaian PAD.

Realisasi belanja tahun anggaran 2021 lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga Bapenda Kabupaten Seluma dinilai sudah mampu menghemat anggaran belanja dan masuk kategori efisien. Pada tahun anggaran 2022 realisasi belanja hampir mendekati anggaran belanja yang telah dianggarkan sehingga realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2022 masuk kategori cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun anggaran 2021 ke tahun anggaran 2022 mengalami penurunan rasio efisiensi. Akan tetapi untuk rata – rata rasio efisiensi Bapenda Kabupaten Seluma sudah masuk kategori efisien. Bapenda Kabupaten Seluma terus mengupayakan penghematan belanja pada tahun anggaran yang akan datang diharapkan rasio efisiensi pada Bapenda Kabupaten Seluma meningkat menjadi sangat efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio efektivitas penerimaan PAD Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021 cukup efektif dan tahun anggaran 2022 tidak efektif sehingga dapat disimpulkan rata – rata rasio efektivitas Bapenda Kabupaten Seluma kurang efektif dengan persentase 82,79%, menunjukkan kinerja yang belum maksimal hal ini terlihat dari masih kurangnya realisasi anggaran dari target anggaran yang telah ditetapkan.
2. Rasio efisiensi belanja Bapenda Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021 belum mencapai target dalam menghemat anggaran belanja namun sudah mencapai kategori efisiensi dan tahun anggaran 2022 mencapai kategori cukup efisien sehingga dapat disimpulkan rata – rata rasio efisiensi Bapenda Kabupaten Seluma sudah masuk kategori efisien dengan persentase 76,57% menunjukkan kinerja yang sudah baik akan tetapi belum maksimal dalam menghemat anggaran belanja.

Saran

1. Bapenda Kabupaten Seluma harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan PAD melalui pendapatan pajak daerah dengan memaksimalkan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga merupakan salah satu komponen PAD yang dapat meningkatkan efektivitas target anggaran PAD, untuk tingkat efisiensi belanja Bapenda

Kabupaten Seluma disarankan memaksimalkan dalam penghematan anggaran belanja sehingga dapat meningkatkan ke target sangat efisien.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah tahun penelitian dan menambah rasio – rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja Bapenda Kabupaten Seluma.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Meiliya Dona, V. A. L. (2020). *Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten oku*. 5(2), 135–144.
- Fasha, R. N. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda. *Penelitian Skripsi*.
- Indra, N., Sijabat, D., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Kantor Camat Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. *EMBA REVIEW*, 3(2), 371–382.
- Ropa, M. O., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *EMBA*, 4(2), 738–747.
- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemrintah Provinsi Sumatera Utara. *Bisman*, 10, 8–18.
- Tibyana, I. M., Agustini, Y., Damayanti, E., Romansyah, A., Adiyanto, R., & Madura, U. T. (2024). *Implementasi Pencatatan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Usaha Rumahan Rempeyek Kacang di Desa*. 3(3), 184–192.
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting. *Public Administration*, 1(1), 72–88.
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., Umami, R., Piksi, P., Indonesia, G., & Tengah, J. (2022). Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis. *E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 6(2), 456–468.